



KANTOR
BUPATI PASURUAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 192-4/2024);
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.

6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PAPBD adalah PAPBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA dan P-PPAS.

Pasal 4

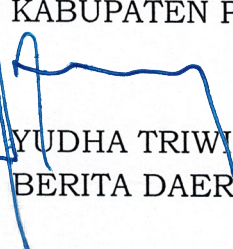
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 - 5 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 - 5 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,


YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 25

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-12
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2 Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	III-4
3.1.3 Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan.....	III-6
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III-12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-13
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-22
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Triwulan I Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Permasalahan Masing-Masing Urusan Tribulan I Tahun 2025 ..	II-6
Tabel 3.1	Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	III-12
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024, Pendapatan APBD Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan 2025	III-16
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025..	III-20
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025	III-23
Tabel 3.5	Target APBD dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	III-25
Tabel 4.1	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	IV-2
Tabel 4.2	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	IV-3
Tabel 4.3	Keselarasan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	IV-6
Tabel 4.4	Keselarasan 33 Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur	IV-8
Tabel 4.5	Keselarasan Indikator SPM dengan Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	IV-44
Tabel 4.6	Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SDG's	IV-49
Tabel 4.7	Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	IV-82
Tabel 4.8	Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025	IV-86

Tabel 4.9	Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Tahun 2025	IV-113
Tabel 5.1	Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah	V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen	I-11
Gambar 4.1 Persandingan Tema Pembangunan Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025	IV-5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 MEI 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah disebutkan bahwa RKPD tahun berjalan dapat dilakukan perubahan, hal ini guna mengakomodir pelaksanaan APBD yang dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat menjadi dasar pertimbangan arah pembangunan daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Kebijakan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, dan pelantikan Kepala Daerah terpilih pada bulan Februari 2025 menjadi dasar harus dilakukan penyesuaian rencana pembangunan daerah yang telah disusun. Karena sejatinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah adalah untuk mendukung ketercapaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana Surat Edaran tersebut dikaitkan dengan tema atau isu pembangunan nasional antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem;
4. Pengendalian inflasi di daerah;

5. Peningkatan pertumbuhan Perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain hal tersebut di atas, pada Tahun 2025 juga telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/Lembaga.

Instruksi tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan maupun pergeseran belanja Perangkat Daerah, serta adanya ketidaksesuaian proyeksi potensi keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pada tahun 2025. Pergeseran dan penyesuaian anggaran akan berpengaruh pada capaian kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, sehingga mungkin

akan dilakukan perubahan target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan perhitungan kembali ketersediaan anggaran dan kebutuhan belanja daerah, serta penetapan target kinerja pada tahun 2025.

Dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dimulai pada bulan Februari 2025 untuk penyusunan Rancangan P-RKPD 2025 pada minggu ke-3 bulan Februari 2025 selanjutnya pada bulan April 2025 dilakukan penyampaian rancangan P-RKPD 2025 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan selanjutnya di bulan yang sama antara minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4 telah terbentuk Rancangan Akhir P-RKPD 2025 yang kemudian dilanjutkan untuk Reviu APIP oleh Inspektorat serta dilakukan tindak lanjut terhadap reviu APIP.

Pada bulan Mei minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 dilakukan penyampaian rankhir ranperkada P-RKPD 2025 kepada Gubernur serta juga dilakukan Fasilitasi Ranperda P-RKPD 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya dilakukan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi P-RKPD 2025 oleh Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, dan setelah itu pada minggu ke-4 bulan Mei 2025 dilakukan penyampaian Ranperkada P-RKPD 2025 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan persetujuan serta penetapan P-RKPD direncanakan pada minggu yang sama.

Uraian yang disampaikan sebelumnya pada bagian awal menunjukkan bahwa P-RKPD tahun 2025 memiliki kedudukan dan peran strategis. P-RKPD tahun 2025 disusun tahun 2025 sebagai tahun transisi dan tahun awal pelaksanaan dan penyelarasan dengan visi, misi, dan program prioritas Bupati / Wakil Bupati. Penyelarasan tersebut, sebagai bagian upaya terintegrasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran melalui target indikator kinerja utama tahun 2025

sebagaimana yang tercantum dalam rancangan RPJMD tahun 2025-2029.

Namun secara umum dan normatif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki kedudukan dan peran strategis, yaitu:

- **Penyesuaian dengan Kondisi Aktual dan Kebijakan:**

Perubahan RKPD memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana kerja dengan perkembangan situasi terkini, perubahan asumsi ekonomi, dan kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kondisi ekonomi yang ada.

- **Menampung Hasil Evaluasi dan Pengendalian:**

Perubahan RKPD juga berfungsi untuk menampung hasil evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Jika ditemukan adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, maka perubahan RKPD dapat menjadi solusi untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan.

- **Memastikan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran:**

Perubahan RKPD memastikan bahwa rencana kerja tetap konsisten dengan perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan anggaran daerah (APBD). Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah dan terpadu, serta anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21) ;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

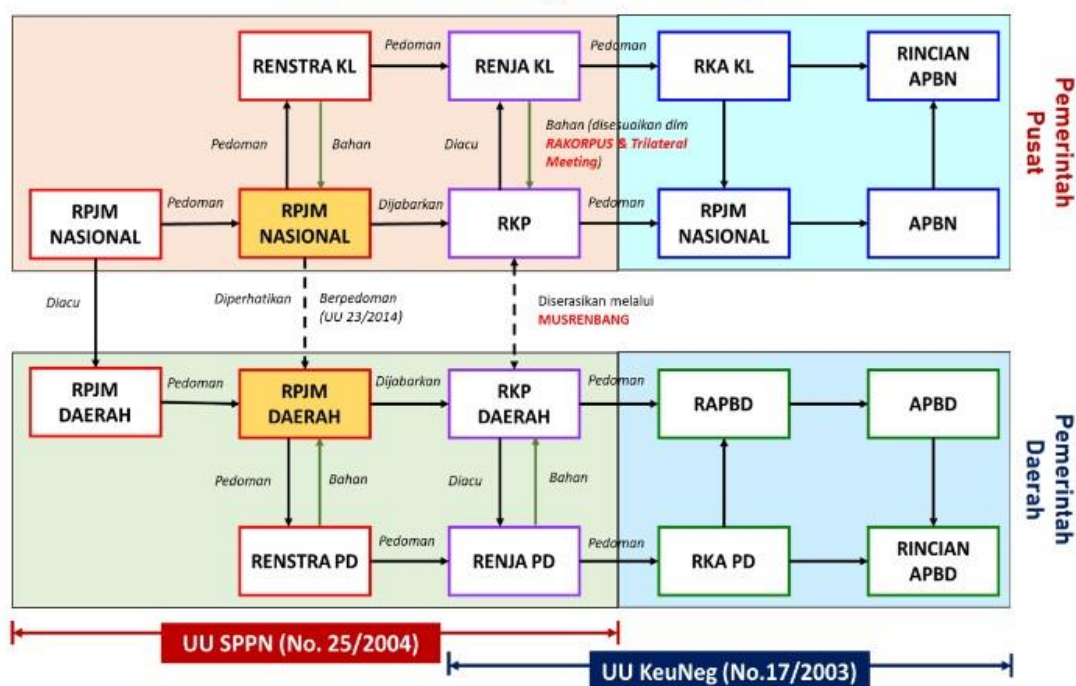
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 192-4/2024);
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Perencanaan nasional diwujudkan melalui perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Hubungan Antar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber: Kemendagri, 2018

Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten

Pasuruan serta mewujudkan efisiensi alokasi yang sesuai dengan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyesuaikan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 serta Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja daerah.
5. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen	
1.4. Maksud dan Tujuan	
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	
Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025	
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
3.2. Gambaran Keuangan Daerah	
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	
Bab VI Penutup	

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara signifikan, maka dilakukan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota diamanatkan pada Pasal 305-306 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyelenggaraan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan RKPD telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Pasuruan periode pelaksanaan triwulan I tahun 2025 (E.60) dapat dilihat pada Buku 1 Tabel 2.2.

Untuk melihat capaian pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan berupa capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target akhir tahun 2025 yang ditetapkan dalam DPA perangkat daerah, berdasarkan realisasi triwulan I secara keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja program sebesar 21,30%, kegiatan sebesar 16,35% dan sub kegiatan sebesar 74,74%. Rekapitan capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan tersebut disajikan pada tabel 2.1.

Sedangkan untuk penyerapan anggaran belanja yang terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 mencapai Rp 797.928.854.261 atau sekitar 24,40% terhadap total belanja sebesar Rp 3.270.857.657.171. Faktor-faktor yang pendorong ketercapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan, dapat diidentifikasi antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan, petunjuk teknik, petunjuk operasional sebagai panduan;
2. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
3. Adanya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

4. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, DAK, DBHCHT dan dana lainnya;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
6. Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah;
7. Tersedia media komunikasi dan informasi sebagai penunjang dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
8. Adanya dukungan baik internal maupun eksternal serta koordinasi yang baik di dalam lingkungan Perangkat Daerah.

Adapun faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, dapat identifikasi antara lain:

1. Adanya rencana efisiensi yang akan dilakukan di bulan Maret, sehingga semua kegiatan yang tidak mendesak tidak direalisasikan dahulu;
2. Adanya pengalihan dalam pengadaan barang dan jasa ke Bagian PBJ yang memerlukan berbagai proses sehingga tata kala pengadaan tidak sesuai periodisasi;
3. Pengadaan barang/jasa tidak bisa dilakukan secara cepat karena penyedia barang/jasa terbatas.
4. Kegiatan sudah dilaksanakan namun di akhir bulan Maret sehingga administrasi keuangan di bulan berikutnya;
5. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum bisa melaksanakan pekerjaan yang bersifat fisik karena direncanakan pada triwulan III atau IV;
6. Untuk pekerjaan yang Pelaksanaan pekerjaan di rencanakan pada triwulan III atau IV;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan ketepatan dalam pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hasil analisis capaian triwulan I tersebut, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 triwulan berikutnya, antara lain:

1. Perangkat Daerah harus memaksimalkan penyerapan anggaran dan kinerja di triwulan berikutnya sesuai dengan perencanaan anggaran dan rencana aksi;

2. Bagi Perangkat Daerah yang menerima DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBHC-HT dan dana transfer lainnya agar segera menyesuaikan dengan juknis;
3. Melaksanakan percepatan pekerjaan fisik pada tribulan berikutnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan identifikasi penyedia sesuai dengan barang/jasa yang dibutuhkan secara tepat waktu;
5. Melaksanakan optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target triwulan.
6. Perangkat Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Asta Cita.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.1	UP Bidang Pendidikan	11,67	13,41	29,64
1.2	UP Bidang Kesehatan			
	Dinas Kesehatan	12	9	861
	RSUD Bangil	12,92	12,92	5,83
	RSUD Grati	90	35	0
1.3	UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	4.70	11.14	10.48
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	18.75	19.56	20.94
1.4	UP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.25	9.51	24.73
1.5	UP Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	Satuan Polisi Pamong Praja	100	16.64	41.57
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.6	UP Bidang Sosial	26.32	18.37	1.442
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
2.1	UP Bidang Tenaga Kerja	7.8	7.8	7.8

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2.2	UP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,00	5,47	1,66
2.3	UP Bidang Pangan	1.82	1.82	1.82
2.4	UP Bidang Pertanahan	1.25	9.51	24.73
2.5	UP Bidang Lingkungan Hidup	26,33	29,1	5,70
2.6	UP Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,79	25	26,08
2.7	UP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57,66	94,43,	57,89
2.8	UP Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,92	3,89	3,43
2.9	UP Bidang Perhubungan	5,23	5,67	2,25
2.10	UP Bidang Komunikasi dan Informatika	8,29	10,60	60,34
2.11	UP Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	10	0,11
2.12	UP Bidang Penanaman Modal	19,17	18,18	24,80
2.13	UP Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4,62	20,83	4,21
2.14	UP Bidang Statistik	0	0	0
2.15	UP Bidang Persandian	0	0	0
2.16	UP Bidang Kebudayaan	7,70	10,96	11,67
2.17	UP Bidang Perpustakaan	0	2,78	1,92
2.18	UP Bidang Kearsipan	12,50	10	8,33
3	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3.1	UP Bidang Perikanan	17,89	13,17	27,89
3.2	UP Bidang Pariwisata	17,60	14,26	16,67
3.1	UP Bidang Perikanan	17,89	13,17	27,89
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,13	7,14	8,82
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	66	79,17	34,78
3.4	UP Bidang Perdagangan	40,30	27,09	30
3.5	UP Bidang Perindustrian	8,14	3,84	3
3.6	UP Bidang Transmigrasi	0	0	0
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
4.1	Sekretariat Daerah	34	32	31
4.2	Sekretariat DPRD	50,12	24,58	36,66
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
5.1	Unsur Perencanaan	13,89	13,33	13,39

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5.2	Unsur Keuangan			
5.3	Unsur Kepegawaian	24,97	42,90	20,87
5.4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	25	50	16,67
5.5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	0	0	0
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
6.1	Inspektorat Daerah	17,90	24,30	31,84
7	Unsur Kewilayahan			
7.1	Kecamatan Bangil	25	14,25	34,90
7.2	Kecamatan Beji	3,48	6,43	4,68
7.3	Kecamatan Gempol	2,75	2,25	9,45
7.4	Kecamatan Gondangwetan	3,14	1,85	0,50
7.5	Kecamatan Grati	0,2	2,7	6,84
7.6	Kecamatan Kejayan	9,19	9,42	7,19
7.7	Kecamatan Kraton	3,69	3,59	3015
7.8	Kecamatan Lekok	8,33	16,67	9,36
7.9	Kecamatan Lumbang	17,22	13,54	10,98
7.10	Kecamatan Nguling	16,43	10,77	6,53
7.11	Kecamatan Pandaan	17,19	13,23	12,01
7.12	Kecamatan Pasrepan	54,16	25	13,41
7.13	Kecamatan Pohjentrek	54,16	25	13,41
7.14	Kecamatan Prigen	31	25	45
7.15	Kecamatan Purwodadi	9,33	19	27,41
7.16	Kecamatan Purwosari	18,83	7,74	13,15
7.17	Kecamatan Puspo	25	20,7	14,5
7.18	Kecamatan Rejos	3,5	5,32	5,36
7.19	Kecamatan Rembang	4,5	6,5	4,8
7.20	Kecamatan Sukorejo	31,67	25,45	43,77
7.21	Kecamatan Tosari	25	20,4	14,52
7.22	Kecamatan Tukur	52,13	36,25	35,14
7.23	Kecamatan Winongan	75	63	70
7.24	Kecamatan Wonorejo	34	25	28
8	Unsur Pemerintahan Umum			
8.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44	18	24
	Rata-Rata	21,30	16,35	74,74

Sumber: Hasil analisis, 2025

Adapun Permasalahan yang dihadapi untuk ketercapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain:

**Tabel 2.3 Permasalahan Masing-Masing Urusan
Triwulan I Tahun 2025**

No.	Urusan	Permasalahan
I.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1	UP Bidang Pendidikan	Adanya efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
2	UP Bidang Kesehatan	Belum ada jadwal pelaksanaan proyek. Karena ada refocusing sehingga kegiatan dijadwal ulang.
3	UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pada tribulan I penyerapan anggaran dalam mekanisme proses pengadaan barang dan jasa pada pembangunan infrastruktur jalan dan pendukungnya, proses pengadaan selain pembangunan fisik harus melalui jasa konsultasi perencanaan.
4	UP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Adanya rencana efisiensi yang akan dilakukan di bulan Maret, sehingga semua kegiatan yang tidak mendesak tidak boleh di realisasikan terlebih dahulu.
5	UP Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Adanya sub kegiatan yang terdapat realisasi anggaran di triwulan I akan tetapi realisasi kinerja masih 0 dikarenakan capaian realisasi anggaran diperuntukkan untuk belanja persiapan kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai target kinerja ada pada tribulan berikutnya. Kegiatan pada triwulan I masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya perubahan sistem pada penatausahaan keuangan. Ada beberapa sub kegiatan pada tribulan I (capaian) yang capaian kinerja nya nol karena mengalami penghematan belanja (refocusing).
6	UP Bidang Sosial	Untuk bantuan permakanaan bagi anak telantar diluar panti masih diusulkan SK Bupati.

No.	Urusan	Permasalahan
II.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
7	UP Bidang Tenaga Kerja	Adanya perubahan anggaran, dimana sudah direncanakan sesuai kebutuhan pada pagu anggaran perencanaan namun permasalahan terkait realisasi pagu anggaran tidak terealisasi sesuai anggaran yang direncanakan, mengakibatkan operasional Dinas Ketenagakerjaan terhambat.
8	UP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ada beberapa sub kegiatan anggaran yang belum terserap dibawah target dikarenakan di DPA APBD Awal 2025 pagu serta rincian Belanja DAK NON fisik BOKB dan PPA belum menyesuaikan dengan juknis, sehingga belum terserap pada triwulan I.
9	UP Bidang Pangan	Perubahan kebijakan atau regulasi sehingga pelaksanaan kegiatan pada triwulan I terhambat.
10	UP Bidang Pertanahan	Adanya rencana efisiensi yang akan dilakukan di bulan Maret, sehingga semua kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaannya.
11	UP Bidang Lingkungan Hidup	Adanya efisiensi anggaran sangat berpengaruh pada penyerapan realisasi anggaran. Pengujian parameter lingkungan belum mencapai target.
12	UP Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adanya perubahan versi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga mempengaruhi proses pengadaan karena penyedia banyak yang belum siap.
13	UP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sub Kegiatan belum terlaksana karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada, antara lain adanya efisiensi.
14	UP Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada beberapa sub kegiatan anggaran yang belum terserap dikarenakan masih dalam proses pengadaan .
15	UP Bidang Perhubungan	Terdapat permasalahan pada SIPD Penatausahaan yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran. Keterlambatan ini berpengaruh terhadap realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan 1 yang masih rendah.
16	UP Bidang Komunikasi dan Informatika	Realisasi anggaran masih rendah karena masih dalam proses pengadaan.

No.	Urusan	Permasalahan
17	UP Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum ada pelaksanaan kegiatan karena akan dilakukan penyesuaian untuk mendukung 33 program prioritas Bupati dan Nawa Cita Presiden.
18	UP Bidang Penanaman Modal	Belum optimalnya koordinasi internal Perangkat Daerah.
19	UP Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Adanya efisiensi anggaran sehingga tidak memungkinkan diserap seluruhnya.
20	UP Bidang Statistik	Masih minimnya koordinasi sehingga data yang ada belum maksimal.
21	UP Bidang Persandian	Masih belum ada pencairan atau realisasi karena masih proses pengadaan.
22	UP Bidang Kebudayaan	Instruksi untuk menunda realisasi pada program kegiatan yang akan mengalami efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
23	UP Bidang Perpustakaan	Adanya efisiensi anggaran yang ditentukan sehingga banyak sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan itu.
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	
24	UP Bidang Perikanan	Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025.
25	UP Bidang Pariwisata	Penyesuaian perubahan anggaran membuat penyerapan anggaran pada triwulan I terhambat dan lemahnya sistem pada aplikasi SIPD RI sering mengalami <i>down</i> atau <i>maintenance</i> sehingga tidak bisa di akses.
26	UP Bidang Pertanian	Perubahan kebijakan atau regulasi sehingga pelaksanaan kegiatan pada triwulan I terhambat. Capaian Kinerja sasaran triwulan I belum bisa tercapai, karena hitungan produktivitas menunggu data 1 tahun dan menunggu data dari BPS. Serapan triwulan I masih sebagian besar dari belanja Gaji ASN. Belanja kegiatan masih belum diserap menunggu efisiensi dari P3D yang masih berproses.
27	UP Bidang Perdagangan	Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan dilaksanakannya kegiatan secara maksimal dengan anggaran seminim mungkin.

No.	Urusan	Permasalahan
28	UP Bidang Perindustrian	Target kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I yang belum tercapai dikarenakan adanya efisiensi.
29	UP Bidang Transmigrasi	Adanya perubahan anggaran, dimana sudah direncanakan sesuai kebutuhan pada pagu anggaran perencanaan namun permasalahan terkait realisasi pagu anggaran tidak terealisasi sesuai anggaran yang direncanakan, mengakibatkan operasional Dinas Ketenagakerjaan terhambat.
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
30	Sekretariat Daerah	Adanya penyesuaian perencanaan dan penganggaran untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yaitu Inpres No. 1 Tahun 2025. Perubahan versi katalog elektronik menyebabkan perubahan tata kelola yang dapat menghambat proses pada pengadaan barang atau jasa pemerintah.
31	Sekretariat DPRD	Adanya Surat Edaran dari Bupati Pasuruan Nomor 900.1/337/424.102/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025.
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
32	Unsur Perencanaan	Dalam rangka Inpres No. 1 Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan terdapat moment pengurangan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada triwulan I.
33	Unsur Keuangan	Adanya kebijakan untuk tidak merealisasikan belanja terlebih dahulu.
34	Unsur Kepegawaian	Adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi atas anggaran belanja mengharuskan beberapa kegiatan harus ditunda sementara.
35	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	Melakukan perhitungan ulang atas anggaran dengan mengutamakan program prioritas.
36	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Pengurangan anggaran dalam rangka amanat Inpres No. 1 Tahun 2025, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada triwulan I.
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
37	Inspektorat Daerah	Adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 sehingga kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan kegiatan lainnya ditunda dan dilakukan penghematan atau

No.	Urusan	Permasalahan
		efisiensi yang mengakibatkan realisasi kinerja dan anggaran kurang maksima
VII	Unsur Kewilayahan	
38	24 Kecamatan	Adanya Surat Edaran dari Bupati Pasuruan Nomor 900.1/337/424.102/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025.
		Belum optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur pada Perangkat daerah dan koordinasi antar instansi.
		Perubahan regulasi dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang masih membutuhkan waktu adaptasi.
		Dengan adanya pembaharuan inaproc versi 6 untuk pengadaan barang jasa menyebabkan adanya sedikit kendala terkait penyerapan anggaran.
VIII	Unsur Pemerintahan Umum	
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pada triwulan I belum ada realisasi anggaran dikarenakan dilaksanakan pada tribulan 2 dan penyesuaian terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini untuk menjaga keselarasan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah didesain dengan menyusun prioritas pembangunan daerah sebagai langkah strategis menghadapi tantangan dan penyelesaian isu strategis tahun 2025. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi belanja, dan prioritas pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional atau Pemerintah Pusat dan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat atau Nasional yang berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional, yaitu:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres ini bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD Tahun 2025. Alokasi anggaran belanja difokuskan pada

peningkatan pelayanan publik, yaitu belanja barang dan jasa serta modal yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk kesejahteraan.

2. Program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan meningkatkan asupan gizi anak-anak dan ibu hamil/menyusui. Program ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM lokal khususnya berkaitan dengan penyediaan bahan baku dan distribusi MBG.

3. Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat desa, seperti koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk lokal, dan layanan lainnya.

4. Asta Cita

Asta Cita merupakan delapan prioritas pembangunan nasional yang merupakan perwujudan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Asta Cita yang relevan dengan kebijakan ekonomi nasional, yaitu :

Asta Cita-5. Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi

Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Asta Cita-6. Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi

Asta Cita ini menekankan pembangunan yang di mulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.

5. Asumsi Indikator Makro Tahun 2025.

Asumsi indikator makro Nasional tahun 2025 merujuk pada asumsi dasar ekonomi dalam penyusunan APBN tahun 2025. Serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian 3nstrume dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

- 2) Inflasi: 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.

Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial

- 3) Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$, sebagai 3nstrume stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.

Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis

- 4) Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.

Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup instrumen APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang

- 5) Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
- 6) Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari dan Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Sumber: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/asumsi-dasar-ekonomi-makro-apbn-2025,-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-kita>).

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Kebijakan ekonomi Pemerintah Jawa Timur direlasikan dengan arah kebijakan pembangunan dan asumsi indikator makro berdasarkan dokumen RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yaitu:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* dan ekonomi biru/*blue economy* dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan

Adapun target indikator makro yang menjadi asumsi penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5.10 - 5.41%
2. Indeks Gini : 0.381 - 0.386
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3.90 - 4.49%
4. Kemiskinan : 9,66 - 8,50%

3.1.3. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Perekonomian Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dipengaruhi kebijakan ekonomi Nasional dan Jawa Timur, sebagaimana yang disampaikan pada subbab sebelumnya dan kondisi perekonomian tahun sebelumnya. Perekonomian Kabupaten Pasuruan tahun 2024 masih mencatat pertumbuhan yang positif. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sementara itu arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi daerah yang ingin diwujudkan di tahun 2025. Kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dengan kebijakan nasional dan visi-misi serta program prioritas pembangunan daerah. Kebijakan nasional atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan pada subbab 3.1.1 dan 3.1.2.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap kebijakan Nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Fasilitasi dan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berupa fasilitasi pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih untuk 365 Desa/Kelurahan serta sosialisasi pendampingan pengisian kelengkapan berkas ke notaris dan sosialisasi pendampingan perizinan kepada 24 Kecamatan.

2. Pengembangan Kebudayaan

Kebijakan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pasuruan dirumuskan berdasarkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disusun tahun 2024. Kebijakan pengembangan kebudayaan disesuaikan dengan Empat Pilar Pemajuan Kebudayaan, yaitu :

- 1) Pilar perlindungan, diarahkan pada perlindungan budaya masyarakat Tengger di Kecamatan Tosari.
- 2) Pilar pengembangan, melalui pengkajian atau penelitian ilmiah dan metode-metode kajian lainnya bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengenali dan mendalami makna dan nilai atas unsur-unsur kebudayaan Suku Tengger.
- 3) Pilar pemanfaatan, menjadikan Penanggalan Tengger menjadi salah satu upaya pembentukan karakter masyarakat Suku Tengger yang memiliki kepribadian dalam kebudayaan.
- 4) Pilar pembinaan, yaitu mengikutsertakan pemerhati budaya untuk mengikuti standarisasi dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Percepatan Penurunan Stunting

Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

Strategi penurunan stunting dilaksanakan secara integratif mulai hulu sampai hilir, antara lain meliputi: peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; pemenuhan asupan gizi; perbaikan pola asuh keluarga; peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan akses air minum dan sanitasi; dan peningkatan kesadaran publik dan perubahan perilaku kunci yang

berpengaruh pada faktor risiko stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

4. Program Makan Bergizi Gratis

Dalam rangka mendukung program nasional makan bergizi gratis, telah beroperasi satu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yayasan anak sekolah indonesia makmur yang berlokasi kecamatan pandaan dengan pola mitra mandiri (bangunan dan alat-alat dapur disediakan oleh mitra, sedangkan ketua SPPG, ahli gizi, operasional dan bahan disiapkan oleh BGN). Dukungan terhadap Program MBG didasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Target 2025 pembangunan SPPG sebanyak 1.542 unit di seluruh Indonesia, dengan ditetapkannya target tersebut maka masing-masing kabupaten/kota diharapkan mengusulkan maksimal 3 lokasi lahan pendirian SPPG dengan kriteria sebagaimana pada surat edaran dimaksud, dengan rencana kegiatan pembangunan dimulai bulan Juni sampai Agustus 2025. Terkait hal ini Kabupaten Pasuruan telah mengusulkan lahan pendirian SPPG sebanyak 5 lokasi yang nantinya akan dilakukan survey tim BGN.

5. Swasembada Pangan

Kebijakan daerah untuk mendukung swasembada pangan yaitu :

- 1) Peningkatan pemanfaatan fungsi jaringan irigasi
- 2) Peningkatan produktivitas komoditas pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.
- 3) Penetapan Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.

- 4) Pemutakhiran data pada seluruh lahan baku sawah (LBS) untuk melihat perubahan/alih fungsi lahan dan mencari lahan pengganti yang masih produktif.
- 5) Pemberian bantuan bibit/benih komoditas pangan dan hortikultura.
- 6) Penerbitan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 100.3.3.2/550/HK/424.013/2025 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui Pemanfaatan Pekarangan di Kabupaten Pasuruan.
- 7) Pengembangan varietas padi jelita.

6. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan diarahkan pada :

- 1) Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.
- 2) Penciptaan ekosistem pengembangan kota kreatif yang kondusif, antara lain dengan membentuk **Pasuruan Creative Network (Pancene)** sebagai sebuah lembaga yang menjadi wadah para pelaku ekonomi kreatif untuk berjejaring saling bersinergi dan berkolaborasi dengan unsur stakeholder.
- 3) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk memberikan jaminan/perlindungan bagi para pelaku kreatif yang didukung program dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 4) Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung pengembangan kreatifitas Pemerintah Daerah dengan menyediakan jaringan WiFi di area-area public.

- 8) Sinergitas antar *penta helix* untuk sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan persyaratan standardisasi dan praktik usaha yang baik (*best practice*) dari usaha ekonomi kreatif.

Sedangkan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana rancangan RPJMD tahun 2025-2029, yang difokuskan di tahun 2025, sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2025					
33PP-01	Beasiswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu	33PP-13	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	33PP-24	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di setiap Kecamatan
33PP-05	Bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah	33PP-14	Pembangunan/ pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	33PP-25	1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Olahraga atau Sepakbola
33PP-07	Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan	33PP-15	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air	33PP-27	Penataan Kawasan Ibukota Bangil
33PP-10	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming, dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani	33PP-19	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	33PP-30	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
33PP-11	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	33PP-21	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk	33PP-31	Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor

PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2025

			unggulan/ Produk UMKM		
33PP-12	IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	33PP-22	Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah	33PP-33	Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun kondisi ekonomi makro daerah direpresentasikan berupa indikator makro ekonomi daerah, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Gini; Tingkat Pengangguran Terbuka; Inflasi; dan Kemiskinan. Kondisi tahun 2024 dan target tahun 2025 indikator makro ekonomi Kabupaten Pasuruan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1. Berdasarkan tabel tersebut terdapat perubahan asumsi indikator ekonomi yaitu pada indikator pertumbuhan ekonomi dari 6,14% menjadi 5,38% atau memperhatikan target nasional dan Jawa Timur. Tingkat inflasi dilakukan perubahan menyesuaikan arahan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, yaitu inflasi diharapkan stabil pada kisaran 1,5-3,5%.

Target awal gini rasio mengalami perubahan, dari target awal berupa interval menjadi angka tunggal namun masih di dalam interval target awal. Penetapan target perubahan berupa angka tunggal dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan capaiannya. Sedangkan target indikator yang lainnya tidak mengalami perubahan. Target indikator makro daerah yang menjadi asumsi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut disesuaikan dengan target tahun 2025 yang ada di Rancangan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Capaian 2024			Target 2025		Target 2025	
		Kab. Pasuruan	Provinsi Jatim	Nasional	Nasional	Jawa Timur	Awal	Perubahan
1.	Angka pertumbuhan ekonomi (%)	5,21	4,95	5,05	5,2	5.10 - 5.41	6,14	5,38
2.	Angka kemiskinan (%)	8,63	10,35	9,36	7,0 - 8	9,66 - 8,50	8,35	8,35
3.	Tingkat Inflasi (%)	0,22	0,29	0,44	1,5-3,5	-	1-3	1,5 - 3,5
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,02	4,88	5,32	-	3.90 - 4.49	4,7	4,70
5.	Indeks pembangunan manusia	72,36	73,38	73,39	-	75,7 - 75,79	72,85	72,85
6	Gini Rasio	0,331	0,372	0,381	0,378 - 0,382	0.381 - 0.386	0,285 - 0,356	0,329

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan terbesar dalam pengembangan perekonomian daerah tahun 2025 adalah penurunan kemiskinan karena berkaitan dengan banyak hal atau multisektor. Upaya penurunan kemiskinan secara berkesinambungan terus dilakukan, Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mencapai angka 8,63%. Tingkat kemiskinan diproyeksikan menurun berada dalam kisaran 8,35 persen pada tahun 2025. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan alokasi anggaran tertentu, tetapi juga memerlukan kerjasama antar pihak agar dana yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dapat dimanfaatkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi Kreatif yang potensial, baik formal maupun informal dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka. untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan

pendapatan dapat dikurang secara efektif. salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi formal maupun informal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan Keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah yang mendukung Asta Cita serta Prioritas nasional meliputi a).Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; b)Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c).Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; d).Pengendalian Inflasi di daerah; e).Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f)Dukungan swasembada pangan; dan g).Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). dan Program Prioritas Provinsi Jawa Timur,, Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan daerah. Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah

dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan rencana proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.699.651.725,00 yang semula pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.3.976.990.626.695,00 menjadi sebesar Rp. 4.056.690.278.420,00.

Terdapat kenaikan Pendapatan Daerah terjadi pada:

1) Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 50.000.000.000,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp.630.044.228.203,00 menjadi sebesar Rp. 680.044.228.203,00.
- Retribusi Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 58.812.315.284,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp.336.254.392.311,00 menjadi sebesar Rp. 395.066.707.595,00

2) Komponen Pendapatan Transfer

- Pendapatan Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp. 7.311.316.466,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 159.043.029.550,00 Menjadi sebesar Rp. 166.354.346.016,00 dikarenakan adanya kenaikan pendapatan bagi hasil pajak sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan penurunan Pendapatan Daerah terjadi pada :

1) Komponen Pendapatan Transfer

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp. 22.742.237.000,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 2.741.964.792.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 2.719.222.555.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dikarenakan adanya penyesuaian pendapatan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Irigasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024, Pendapatan APBD Tahun 2025,
dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan 2025

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.352.368.857.825,30	3.658.922.547.419,46	3.796.899.263.556,28	3.976.990.626.695,00	4.056.690.278.420,00	79.699.651.725,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	736.238.743.114,30	825.315.022.145,46	905.138.895.757,28	1.075.982.805.145,00	1.171.113.377.404,00	95.130.572.259,00
4.1.01	Pajak Daerah	452.520.753.582,18	503.302.286.143,93	518.528.935.676,74	630.044.228.203,00	680.044.228.203,00	50.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.794.826.500,12	39.386.573.646,61	372.584.126.012,22	336.254.392.311,00	395.066.707.595,00	58.812.315.284,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.829.702.733,00	4.982.159.407,00	5.137.050.127,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	245.093.460.299,00	277.644.002.947,92	8.888.783.941,32	104.934.184.631,00	91.252.441.606,00	(13.681.743.025,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.567.448.223.132,00	2.762.461.968.553,00	2.813.236.382.551,00	2.901.007.821.550,00	2.885.576.901.016,00	(15.430.920.534,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.316.302.794.650,00	2.453.704.926.353,00	2.218.879.847.066,00	2.741.964.792.000,00	2.719.222.555.000,00	(22.742.237.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	251.145.428.482,00	308.757.042.200,00	223.488.826.485,00	159.043.029.550,00	166.354.346.016,00	7.311.316.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.681.891.579,00	71.145.556.721,00	78.523.985.248,00	-	-	-

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Hibah	1.892.000.000,00	-	8.143.557.000,00	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	46.789.891.579,00	71.145.556.721,00	70.380.428.248,00	-	-	-

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dan mendasari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 40.517.095.985,63 dari target APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.346.062.666.981,00 menjadi sebesar Rp. 4.305.545.570.995,37, penambahan dan penurunan belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Perubahan RKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Terdapat penambahan Belanja pada :

1. Belanja Barang dan Jasa;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
4. Belanja Bagi Hasil

Terdapat penurunan Belanja pada :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. Belanja Tidak Terduga; dan
7. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja modal yang mengalami kenaikan guna mendukung salah dari 33 Program Prioritas Bupati Pasuruan khususnya pada Program Prioritas Nomor 7 peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang Pendidikan dan Kesehatan khususnya pemeliharaan ruang kelas maupun ruang penting lain di sekolah seperti UKS (unit kesehatan sekolah), perpustakaan, utililty yang mengalami kerusakan mulai ringan, sedang hingga rusak berat, dalam belanja Perubahan RKPD Tahun 2025 secara terperinci terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025**

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA DAERAH	3.450.040.247.082,16	3.733.513.101.278,00	3.746.327.695.687,55	4.346.062.666.981,00	4.305.545.570.995,37	(40.517.095.985,63)
5.1	BELANJA OPERASI	2.343.945.791.110,45	2.674.895.675.790,00	2.766.874.460.869,55	3.272.747.352.671,05	3.132.848.246.088,12	(139.899.106.582,93)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.133.803.924.679,00	1.229.526.411.903,00	1.327.586.999.496,00	1.822.952.221.477,63	1.685.013.820.576,24	(137.938.400.901,39)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.509.247.583,00	1.219.035.071.080,00	1.217.142.324.381,55	1.309.039.242.716,42	1.311.786.737.034,88	2.747.494.318,46
5.1.05	Belanja Hibah	165.372.279.498,45	208.154.192.807,00	212.732.536.992,00	138.665.288.477,00	134.637.088.477,00	(4.028.200.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.260.339.350,00	18.180.000.000,00	9.412.600.000,00	2.090.600.000,00	1.410.600.000,00	(680.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	476.867.550.144,71	437.513.395.687,00	331.147.189.110,00	385.656.047.224,95	508.538.535.076,35	22.882.487.851,40
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.360.760.023,40	141.502.945.421,00	128.780.587.363,00	208.527.449.727,81	309.831.287.591,54	101.303.837.863,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.196.619.083,72	133.147.504.812,00	61.282.725.362,00	67.424.024.134,65	109.185.497.812,15	41.761.473.677,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.174.394.637,59	160.878.740.804,00	139.527.507.686,00	107.828.254.312,49	87.781.412.122,66	(20.046.842.189,83)

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.135.776.400,00	1.984.204.650,00	1.243.368.699,00	1.695.319.050,00	1.559.337.550,00	(135.981.500,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	313.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.345.474.996,00	3.411.447.525,00	6.874.196.287,00	40.000.000.000,00	42.882.134.535,00	2.882.134.535,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.345.474.996,00	3.411.447.525,00	6.874.196.287,00	40.000.000.000,00	42.882.134.535,00	2.882.134.535,00
5,4	BELANJA TRANSFER	617.881.430.831,00	617.692.582.276,00	641.431.849.421,00	647.659.267.085,00	643.266.255.295,90	(4.393.011.789,10)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	41.704.880.895,00	47.007.207.368,00	57.651.190.042,00	54.674.419.405,00	66.551.407.615,90	11.876.988.210,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	576.176.549.936,00	570.685.374.908,00	583.780.659.379,00	592.984.847.680,00	576.714.847.680,00	(16.270.000.000,00)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 370.772.040.286,00 menjadi Rp. 250.555.292.575,37 Penurunan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Penurunan tersebut didasari hasil An-Audited Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Perhitungan bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan tetap seperti pada tahun 2025 dalam APBD murni yaitu sebesar Rp,1.700.000.000,00, Adapun rincian pembiayaan daerah terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024, Belanja APBD Tahun 2025, dan
Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2025

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi /Target Perubahan RKPD Tahun 2025 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	372.245.667.822,04	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	370.772.040.286,00	250.555.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	372.245.667.822,04	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	370.772.040.286,00	250.555.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	372.245.667.822,04	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	369.072.040.286,00	248.855.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	250.555.292.575,37	-	-	-

Dalam upaya percepatan Pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. dibutuhkan sokongan dana dari APBD maupun diluar APBD, Pendanaan pembangunan ini dengan cara memanfaatkan potensi wilayah atau dengan menggunakan pihak ketiga metode ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sumbangan, hibah, Kerjasama dengan Badan Usaha (KPBUs), program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Pendanaan ini bersifat tidak mengikat yang digunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Sebagai berikut :

- Sumbangan atau pemberian yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, dapat berupa uang, barang, atau jasa oleh pihak lain seperti Badan Usaha Pemerintah/ swasta maupun perseorangan;
- Hibah atau Pemberian yang bersifat tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kerjasama dengan skema KPBUs (*Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha*), melalui pemetaan potensi yang dapat dilakukan kerjasama dengan skema tersebut, serta menyiapkan kerangka regulasi dan melakukan perencanaan lebih matang
- Mengoptimalkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui penguatan pendataan dan melakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah;

Inisiatif Pembangunan dengan cara melibatkan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah juga telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya di sektor Infrastruktur, swasta cukup tertarik karena dianggap sebagai peluang. antisipasi pemerintah adalah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pemerintah Daerah akan mencoba

mengurangi risiko yang akan dialami oleh pihak Swasta. “Alternatif-alternatif dan inovasi yang dilakukan pemerintah terus dilakukan guna mencapai target kebutuhan infrastruktur yang diinginkan, dari kesimpulan tentang pendanaan dari pihak ketiga akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan lainnya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan, penerimaan sumbangan atau hibah dari pihak ketiga harus diakui dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang diterima dari sumbangan atau hibah pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara terperinci disajikan dalam Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Target APBD dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		APBD Tahun 2025	Perubahan Rancangan P-RKPD	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.075.982.805.145,00	1.171.113.377.404,00	95.130.572.259,00
4.1.01	Pajak Daerah	630.044.228.203,00	680.044.228.203,00	50.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	336.254.392.311,00	395.066.707.595,00	58.812.315.284,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104.934.184.631,00	91.252.441.606,00	(13.681.743.025,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.901.007.821.550,00	2.885.576.901.016,00	(15.430.920.534,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.741.964.792.000,00	2.719.222.555.000,00	(22.742.237.000,00)

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		APBD Tahun 2025	Perubahan Rancangan P-RKPD	
4.2.04	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.043.029.550,00	166.354.346.016,00	7.311.316.466,00
	Jumlah Pendapatan	3.976.990.626.695,00	4.056.690.278.420,00	79.699.651.725,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.272.747.352.671,05	3.132.848.246.088,12	(139.899.106.582,93)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.822.952.221.477,63	1.685.013.820.576,24	(137.938.400.901,39)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.039.242.716,42	1.311.786.737.034,88	2.747.494.318,46
5.1.05	Belanja Hibah	138.665.288.477,00	134.637.088.477,00	(4.028.200.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.090.600.000,00	1.410.600.000,00	(680.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	385.656.047.224,95	508.538.535.076,35	122.882.487.851,40
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.527.449.727,81	309.831.287.591,54	101.303.837.863,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.424.024.134,65	109.185.497.812,15	41.761.473.677,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.828.254.312,49	87.781.412.122,66	(20.046.842.189,83)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.695.319.050,00	1.559.337.550,00	(135.981.500,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	181.000.000,00	181.000.000,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.828.254.312,49	87.781.412.122,66	(20.046.842.189,83)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.695.319.050,00	1.559.337.550,00	(135.981.500,00)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000,00	20.892.534.535,00	(-19.107.465.465,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	20.892.534.535,00	(-19.107.465.465,00)

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		APBD Tahun 2025	Perubahan Rancangan P-RKPD	
5,4	BELANJA TRANSFER	647.659.267.085,00	643.266.255.295,90	(4.393.011.789,10)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	54.674.419.405,00	66.551.407.615,90	11.876.988.210,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	592.984.847.680,00	576.714.847.680,00	(16.270.000.000,00)
	Jumlah Belanja	4.346.062.666.981,00	4.305.545.570.995,37	(40.517.095.985,63)
	Total Surplus/(Defisit)	369.072.040.286,00	(248.855.292.575,37)	120.216.747.710,63
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	370.772.040.286,00	250.555.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	370.772.040.286,00	250.555.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	369.072.040.286,00	248.855.292.575,37	(120.216.747.710,63)
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 harus disesuaikan dengan visi, misi, program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program prioritas nasional (asta cita). Berkaitan dengan hal ini maka agar tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat dioperasionalkan dalam Perubahan RKPD tahun 2025, dilakukan penyelarasan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan yaitu: ***Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan***. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan lima upaya berupa misi, yaitu:

1. Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat.
2. Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran.
3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.
4. Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.

Selanjutnya hasil penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

RPJMD KAB. PASURUAN TH. 2025-2029		TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN P-RKPD KAB PASURUAN TH. 2025	
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan	(Misi-1) Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia
	(Misi-3) Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif		Menurunnya pengangguran
			Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	(Misi-2) Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
	(Misi-4) Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerin- tah Daerah, Pemerin- tah Desa, Dunia Usaha dan Masyara- kat sebagai Pilar Membangun Daerah		Meningkatnya Iklim Investasi
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan
	(Misi-5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
			Meningkatnya birokrasi yang kapabel
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sedangkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan untuk mewujudkan visi dan sebagai penjabaran konkrit dari lima misi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati

NO	33 PROGRAM PRIORITAS
1	Bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
2	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
3	Santripreneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis ponpes
4	Peningkatan layanan UHC dan ambulan gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan
5	Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
6	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan
7	IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
8	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukunag infrastruktur menuju daerah wisata
9	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
10	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
11	Penciptaan lapangan kerja baru dengan memprioritaskan naker asli pasuruan
12	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
13	Pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekraf dan sertifikasi produk unggulan/produk UMKM
14	RTH dan atau taman bermain di setiap kecamatan
15	Revitalisasi pasar tradisional

NO	33 PROGRAM PRIORITAS
16	Pembangunan jalan poros kab dengan standart hotmix/cor
17	Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh
18	Penataan Kawasan Ibukota Bangil
19	Pengembangan pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional
20	Beasiswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu
21	Klinik Kesehatan/ambulans untuk pondok pesantren
22	Dukungan Pembangunan dan operasional RS NU
23	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun nonformal
24	Peningkatan kualitas sarpras, akses, serta kualitas SDM pendidikan dan Kesehatan
25	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
26	UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
27	Satu kecamatan satu sekolah olahraga atau sepakbola
28	Persekabpas naik kelas
29	Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (kelompok tani, ternak, nelayan) dan BUMDES
30	Peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa (perangkat desa, RT/RW, kader desa, linmas, BPD)
31	Islamic center dan perpustakaan daerah yang representative
32	Digitalisasi layanan publik, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE
33	Bantuan keuangan khusus untuk desa secara merata

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 ini tetap mengacu pada tema pembangunan Tahun 2025, tetapi disesuaikan dengan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan dan

Program Asta Cita. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah : **“Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”**.

Tema tersebut didetailkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat
2. Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik

Sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur, tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan harus selaras dengan tema pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keselarasan tema pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah :



Gambar 4.1 Persandingan Tema Pembangunan Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Adapun hasil penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati dapat dilihat dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Keselarasan Program Prioritas Daerah
Tahun 2025 dengan Misi dan Program Prioritas Bupati
dan Wakil Bupati**

Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
PPD 1 Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat	Misi 3 Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif	Beasiswa untuk santri / siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta bea siswa untuk yatim dan anak tidak mampu (1)
PPD 3 Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal		Peningkatan kualitas sarana, prasarana, akses serta kualitas SDM di bidang pendidikan dan Kesehatan (7)
		Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun informal (6)
		Klinik kesehatan/ ambulance untuk pondok pesantren (2)
		Dukungan pembangunan dan operasional rumah sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) (4)
PPD 2 Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat	Misi 1 Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal (30)
		Islamic centre dan perpustakaan daerah yang representative (29)
		Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (orang lanjut usia,

Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
		anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat atau disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (9)
		Bantuan kelembagaan untuk ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan dan tempat ibadah (5)
		Pengembangan pusat Lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional (20)
		Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja buruh (32)
	Misi 2 Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan (19)
		Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia industry dengan kelompok ekonomi masyarakat (kelompok tani, kelompok ternak,

Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
		kelompok nelayan dan BUMDES) (23)
PPD 4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak Berbasis Elektronik	Misi 4 Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah	Peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur Pemerintah Desa (Perangkat Desa, RT/RW, Kades Desa, Linmas dan BPD) (17)
	Misi 5 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang lebih Profesional dan Humanis	Digitalisasi layanan publik, pengembangan Pasuruan Satu Data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (33)

Tabel 4.4 Keselarasan 33 Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Klinik kesehatan/Am bulance untuk pondok pesantren	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			Dukungan Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kab	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			Peningkatan layanan UHC dan ambulance gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
			1 (Satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Desa Dan Kelurahan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Persekabpas Naik Kelas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representatif	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
		Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, RT/RW, Kader Desa, Linmas dan BPD)	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
			Kemudahan Perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
				Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3	Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Bea siswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan/pemuda berprestasi serta bea siswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Daerah
					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
			Santripeneur / wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (Orang Lanjut usia,	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah		
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Bencana Kabupaten/Kota
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu)

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Daerah Kabupaten/Kota
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4	Pengendalian Inflasi di daerah		Fasilitasi Temu usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia Industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			nelayan) dan BUMDES		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Merdeka Pupuk, Petani Milenial, Eco Farming dan Pengembangan teknologi pertanian untuk petani	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
					Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			Peningkatan Infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
					Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
5	Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Penciptaan Lapangan Kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
		Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Bantuan kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pembangunan Infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/prod uk UMKM	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerahbidang Perekonomian	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Penataan Kawasan Ibukota Bangil	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Rtrw Dan Rencana Rinci Tata Ruang Rrtr Kabupaten/Kota
			Revitalisasi Pasar Tradisional	Program Peningkatan Sarana	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Distribusi Perdagangan	
			Pembangunan Jalan poros kabupaten dengan standart Hotmix/Cor	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan/ pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
					Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di tingkat kecamatan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
			Penataan Kawasan Ibukota Bangil	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Rtrw Dan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Rencana Rinci Tata Ruang Rrtr Kabupaten/Kota
			Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
				Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
6	Dukungan swasembada pangan	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Merdeka Pupuk, Petani Milenial, Eco Farming dan Pengembangan teknologi pertanian untuk petani	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
				Program Pengelolaan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Perikanan Budidaya	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
			Peningkatan Infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungaidalam Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
					Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
7	Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa secara merata	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
			Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
				Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
					Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
					Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
				Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	33 PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan transformasi yang dilaksanakan bersama secara sinergis oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. PPD-1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:

I. Bidang Pendidikan

- a. Percepatan wajib belajar 9 (sembilan) tahun Pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal.
- b. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dasar.
- c. Pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
- d. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

II. Bidang Kesehatan

- a. Pemerataan dan peningkatan jaminan kesehatan masyarakat (UHC).
- b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- c. Penurunan AKI- AKB dan penurunan prevalensi stunting.
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan melalui integrasi pelayanan primer.
- e. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

III. Bidang Permukiman

- a. Peningkatan desa ODF dengan kolaborasi antar sektor.
- b. Peningkatan akses infrastruktur sanitasi dasar (air minum, sanitasi, rumah layak huni).
- c. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

2. PPD-2. Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:

- a. Penguatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- b. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis.
- c. Penguatan ekonomi desa melalui penguatan lembaga keuangan desa (koperasi, BUMDES, dan Lembaga keuangan lainnya).
- d. Percepatan penyediaan sarana prasarana terintegrasi dan andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri dan perdagangan.
- e. Pemanfaatan potensi dan peluang untuk meningkatkan investasi.

3. PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan berbasis Kawasan.
 - b. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi masuk pasar ekspor/global.
 - c. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
 - d. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
 - e. Pemanfaatan dan pelestarian potensi warisan geologi menuju penetapan dan pengembangan taman bumi (geopark) dalam rangka pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
 - f. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, religi, dan heritage secara kolaboratif dan partisipatif - Pengelolaan Amenitas Pendukung.
 - g. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
 - h. Penanganan Kerawanan Lingkungan dan Kebencanaan resiko tinggi serta Pengendaliannya sebagai dampak perubahan iklim.
 - i. Pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
 - j. Penanganan keamanan dan keselamatan lalu lintas pada jalan raya.

4. PPD-4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak Berbasis Elektronik, dilaksanakan melalui arah kebijakan transformasi :

- a. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan berketahanan.
- b. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah.
- e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE.
- f. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPKD tahun 2025 sampai dengan triwulan I, evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan penyesuaian program prioritas pembangunan tahun 2025 dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden dan wakil Presiden, terdapat banyak perubahan terhadap program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Guna mendukung ketercapaian kinerja Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta ketercapaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, beberapa program prioritas pada perubahan tahun 2025 antara lain :

1. Fasilitasi dan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Asta Cita) berupa fasilitasi pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih untuk 365 Desa/Kelurahan serta sosialisasi pendampingan pengisian kelengkapan berkas ke notaris dan sosialisasi pendampingan perijinan kepada 24 Kecamatan.

2. Fasilitasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa penyediaan lahan untuk pembangunan dapur umum.
3. Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan aman, melalui perbaikan/rehabilitasi bangunan gedung/kelas/ruang guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dalam kondisi rusak berat.
4. Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC/universal Health) berupa pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Penyediaan prasarana transportasi (infrastruktur jalan) beserta sarana pendukungnya yang memadai guna mendukung pengembangan perekonomian dan akses masyarakat.
6. Pembangunan pusat pelatihan dan pengembangan kreatifitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM masyarakat khususnya generasi muda dan mengembangkan usaha mikro kecil di Kabupaten Pasuruan.
7. Pengembangan bibit pertanian dan benih ternak unggul di Kabupaten Pasuruan.
8. Pembangunan *Command Center* Kabupaten Pasuruan sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai situasi terutama dalam penanganan peristiwa penting atau darurat.
9. Pengadaan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
10. Penyusunan perencanaan pembangunan pasar, RTH dan tempat wisata.
11. Penyiapan shelter bencana guna meningkatkan waktu tanggap kejadian bencana (banjir dan kekeringan).
12. Rehabilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

13. Rehabilitasi jaringan irigasi guna meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan.
14. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang guna memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat.

Adanya perubahan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 mengakibatkan adanya perubahan pada target anggaran untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 sekitar Rp 1.794.677.954.177,00 sedangkan target anggaran untuk mendukung 33 Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan sekitar Rp 566.515.246.850,00.

Selain penyelerasan dengan program prioritas nasional, provinsi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati, pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) tetap menjadi perhatian sebagai program mandatory. Keselarasan SPM dengan kegiatan/subkegiatan sebagaimana Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Keselarasan Indikator SPM dengan Kegiatan/Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		
	Pendidikan Dasar Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN		
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pelayanan Kesehatan usia produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh masunia (HIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM		
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
5	BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS		
	Pelayanan Pada Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	Pelayanan Pada Informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelayanan Pada Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Pelayanan Pada Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Pelayanan Pada Penyeleamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
6	BIDANG URUSAN SOSIAL		
	Pelayanan Pada Penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	Pelayanan Pada Anak terlantar diluar panti		
	Pelayanan Pada Lanjut Usia terlantar diluar panti		

NO.	INDIKATOR SPM/JENIS PELAYANAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelayanan Pada Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti		
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota		
	Pelayanan Pada Penyandang disabilitas terlantar diluar panti		

Berikut adalah pemetaan progam/kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

Tabel 4.6 Program/Kegiatan Pendukung SDG's

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
1	TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Program Pendaftaran Penduduk	Penataan pendaftaran penduduk
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)
			Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
			Pengelolaan pembudidayaan ikan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian
		Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	TANPA KELAPARAN (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Kemandirian Pangan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
			Peningkatan Pelayanan BLUD
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			Penyimpanan sementara Limbah B3
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyimpanan sementara Limbah B3
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyimpanan sementara Limbah B3
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua)		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)		
		Program Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Pendapatan Daerah	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9	BERKURANGNYA KESENJANGAN (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
		Program Pendaftaran Penduduk	Penataan pendaftaran penduduk
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
			Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian
		Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10	KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)		
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
11	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan)		
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
12	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya)		
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)		
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Mutasi dan Promosi ASN
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penataan Pendaftaran Penduduk
		Program Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN SDG's	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
14	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penataan Pendaftaran Penduduk
		Program Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD Tahun 2025 memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian target kinerja IKU dan IKD tahun 2025 yang ditetapkan di awal (penyusunan RKPD tahun 2025). Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan, antara lain hasil capaian tahun 2024, yang belum diketahui pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024. Penyesuaian tersebut disajikan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.7
Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,49 – 7,38	5,38
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,63	7,21 – 5,63	8,35
3	Indeks Pembangunan Manusia* (IPM)	-	72,36	72,70	72,85
4	Indeks Gini	-	0,331	0,2856 – 0,3569	0,329
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,02	4,70 – 4,17	4,70
6	PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	121.689	123.530	133.280
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	68,68	69,52	84,80
8	Indeks Wiliamson	-	0,269	0,245	0,245
9	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.933.430	5.984.738	5.984.738
10	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	76.047.360	76.940.995	76.940.995
11	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	12.960	9.400	13.000
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	68,73	48,15	68,76
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	65,06	71,68	71,68
14	Indeks Risiko Bencana	-	109,38	106,27	108,88
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,08	91,33	91,34
16	Indeks Pembangunan Keluarga	-	62,10	62,43	62,75
17	Indeks Ketahanan Pangan	-	80,31	80,57	80,57
18	Nilai AKIP	-	76,34 (B)	81,40 (A)	77,66 (B)
19	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
20	Indeks Profesionalitas ASN	-	77,32	71,45	77,50
21	Indeks SPBE	-	3,88	2,75	3,89
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	93,41	93,75	93,68
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	81,44	-	81,82
24	Indeks Ekonomi Berkelanjutan	-	72,59	-	72,60
25	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	-	3,36	-	3,42
26	Indeks Integritas	-	69,34 (Rentan)	-	70,60
27	Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)	-	55,12	-	59,61
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,346	-	0,520
29	Rasio PDRB Industri Pengolahan	-	60,65	-	61,05
30	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	-	3,78	-	3,87
31	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian-Perikanan	-	5,73	-	5,73
32	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	-	30,74	-	27,62
33	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-	6,06	-	6,03
34	Potensi Penurunan emisi GRK	Ton CO2 eq	4.062,02	-	4.195,35
35	Rasio Kewirausahaan	%	3,86 (2023)	-	4
36	Persentase PPKS	%	3,59	-	2,39
37	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	%	10,37	-	8,268
38	Indeks Inovasi Daerah (IID)		67,70	-	68,32

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
			39(sangat inovatif)		
39	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi		4,14	-	5
40	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		56,55 (cukup)	-	58,79
41	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		4,52 (A)	-	4,55
42	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,45	-	0,60
43	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	14,89	-	15,54
44	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	11	-	20
45	Konsumsi Listrik perKapita	kWh/kapita	6,828,28	-	7,126,77
46	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	7,53	-	7,78
47	Rasio Kebutuhan Air baku dan Ketersediaan Air Baku				
	Irigasi	%	73,23	-	73,31
	Air Minum	%	15,47	-	15,56
48	Prevalensi Stunting pada Balita	%	5,32	-	5,3
49	Cakupan Kepesertaan JKN	%	100	-	100
50	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen literasi (Angka literasi)				
	SD/MI	%	80	-	83
	SMP/MTs	%	79,50	-	83
51	Persentase satuan Pendidikan yang				

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	mencapai standar kompetensi minimum asesmen numerasi (Angka Numerasi)				
	SD/MI	%	77	-	84
	SMP/MTs	%	78,09	-	84
52	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	12,93	-	13,00
53	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	30	-	37,59
54	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur	%	6,37	-	6,56
55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,27	-	63,59
56	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	10,95	-	10,79
57	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	77,19	-	77.50
58	Persentase Desa Mandiri	%	39,3 (dasar IDM)	-	9,97
59	Tingkat Inflasi	%	1,90 (Kota Probolinggo)	-	1,5 - 3,5
60	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100	-	100

Tabel 4.8
Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2025

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,99	89,50	89,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,75	95,61	98,76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	82,49	89,18	89,18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	%	57,33	53,64	57,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,773	0,0713	0,774	DINAS KESEHATAN
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,773	0,0731	0,774	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86,66	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94,11	100	100	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,49	100	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,24	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,96	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	75,59	100	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	73,83	89,25	89,25	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	69,48	81,84	81,84	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	%	68,85	68,86	68,86	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	79,99	79,91	80	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	34,88	37	37	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	18,39	24,87	24,87	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,57	4,53	2,56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	29,73	29,83	29,83	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	68,75	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		informasi rawan bencana					
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	3,60	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	1,22	1,23	1,23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	%	77,84	84	84	DINAS SOSIAL

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)					
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	77,69	100	100	DINAS SOSIAL
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	77,78	70,61	77,79	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	94,33	94,50	94,50	DINAS KETENAGAKERJAAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	13.781.068.856	13.000.000.000	14.000.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	77,65	77,56	77,66	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	44,27	41,50	44,28	DINAS KETENAGAKERJAAN
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	23,18	23,15	23,1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	100	0,006	0,008	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,02	9	6,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	49,30	49,40	49,40	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	Pertanahan	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	48,81	48	48,82	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penanganan sengketa tanah garapan yang	%	100	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		dilakukan melalui mediasi					
11	Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	%	35,93	35	35,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	20	58,22	58,22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	%	100	98,87	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	46,82	35	46,83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Kepemilikan akta kelahiran	%	91,40	89,5	91,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	50	50	60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	1,72	1,70	1,73	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,88	1,88	1,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK.

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,72	80,55	80,55	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3,40	3,84	3,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
15	Perhubungan	Rasio Konektivitas	%	0,48	0,42	0,49	DINAS PERHUBUNGAN
		Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	%	0,367	0,373	0,373	DINAS PERHUBUNGAN
16	komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	70	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	11,36	97,94	38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	250,16	21,7	21,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
17	Kopertasi. Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100	100	100	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	66,27	66,28	66,28	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	%	5,30	1,02	5,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,70	0,015	0,71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	%	23,14	9,1	23,15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		organisasi sosial kemasyarakatan					
		Peningkatan prestasi olahraga	%	96	96	97	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	%	49,92	69,77	69,77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,33	85,50	85,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	59,56	59,57	59,57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	-	100	80	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	45,53	45,54	45,54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	47.666,34	47.777,31	47.777,31	DINAS PERIKANAN
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	69,09	69,10	69,10	DINAS PARIWISATA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	13	21	21	DINAS PARIWISATA
		Tingkat hunian akomodasi	%	0,63	0,64	0,64	DINAS PARIWISATA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	16,61	16,63	16,63	DINAS PARIWISATA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,80	1,81	1,81	DINAS PARIWISATA
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	621,65	621,66	621,66	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-8,50	-8,51	-8,51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
28	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	100	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	95,83	95,84	95,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	%	100	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	98,23	98,24	98,24	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	22,52	22,53	22,53	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	-10,40	12	12	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
31	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	56,02	56,03	56,03	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14,87	13,96	14,88	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	58,16	43,84	58,17	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-7,17	-7,85	-7,85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	17,25	1,50	1,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Manajemen Aset	-				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Apakah ada daftar asset tetap?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PENDAPATAN DAERAH
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,36	1,98	1,98	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
33	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT DAERAH
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT DAERAH
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	7,69	9,17	9,17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PENDAPATAN DAERAH
		Rasio PAD	%	23,84	20,23	23,85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	67,93	77,08	77,08	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel 4.9
Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja/
Jenis Layanan SPM Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	44.450	45.637	45.637
	Angka partisipasi sekolah	%	87,58	100	100
	Angka partisipasi murni	%	98,73	100	100
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	53,21	76	76
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	80,58	79	79
	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	29,17	73	73
	Kecukupan formasi guru ASN	%	63,64	100	100
	Indeks distribusi guru	%	0,36	2	2
	Proporsi PTK bersertifikat	%	32,72	38	38
	Proporsi PTK penggerak*	%	2,08	2	2,08
2	Pendidikan Dasar				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	221.395	284.258	284.258
	Angka partisipasi kasar	%	90,32	100	100
	Angka partisipasi sekolah	%	98,9	100	100
	Kemampuan literasi	Nilai	77,35	83,00	83,00
	Kemampuan numerasi	Nilai	71,31	84,00	84,00
	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,49	82	82
	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,81	81	81
	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,31	74,71	74,71
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,51	78,05	78,05
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,75	63,60	63,60
	Kecukupan formasi guru ASN	%	80,67	95	95
	Indeks distribusi guru	%	0,36	1	1
	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,74	48	50,74

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Proporsi PTK penggerak*	%	4,88	6	6
3	Sekolah Menengah Pertama				
	Angka partisipasi kasar	%	95,03	100	100
	Angka partisipasi sekolah	%	82,49	100	100
	Kemampuan literasi	Nilai	75,31	83,00	83,00
	Kemampuan numerasi	Nilai	72,09	84,09	84,09
	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,72	82	82
	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,28	81	81
	Indeks iklim keamanan	Nilai	68,68	69,89	69,89
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,04	74,35	74,35
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,28	61,76	61,76
	Kecukupan formasi guru ASN	%	88	91,30	91,30
	Indeks distribusi guru	%	0,34	1	1
	Proporsi PTK bersertifikat	%	43,34	48	48
	Proporsi PTK penggerak*	%	3,05	5	5
	Kesetaraan				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	13.101	11.820	13.101
	Angka partisipasi kasar	%	0	0	0
	Angka partisipasi sekolah	%	57.33	100	100
	Kemampuan literasi	Nilai	44.53	83	83
	Kemampuan numerasi	Nilai	43.52	88	88
	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.46	67	67
	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.37	56	56
	Indeks iklim keamanan	Nilai	64.34	70	70
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	60.42	75	75
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53.07	70	70
	Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0
	Indeks distribusi guru	%	0	0	0
	Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0
	Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0
BIDANG KESEHATAN					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	24.670	9.302	24.670

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	22.189	192	22.189
	Tablet tambah darah	Tablet	4.440.600	552.672	4.440.600
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	24.495	25.304	25.304
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	24.495	25.304	25.304
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	24.495	25.304	25.304
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	24.495	25.304	25.304
	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	20.533	24.153	24.153
	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.533	18.564	20.533
	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33	18.564	18.564
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	66	38	66
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	66	58	66
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	66	108	66
	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	21.250	24.670	21.250
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	24.522	6.560	24.522
	Formulir partograph	Formulir	23.064	24.221	24.221
	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	23.064	24.221	24.221
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.533	24.221	24.221
	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33	24.221	24.221

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	33	34	34
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	715	715
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	1.124	1.124
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	23.177	6.496	23.177
	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	22.331	27.851	27.851
	Vitamin K1 injeksi	Ampul	23.177	27.851	27.851
	Salep/tetes mata antibiotic	Orang	23.177	27.851	27.851
	Formulir bayi baru lahir	Formulir	23.177	27.851	27.851
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	23.177	27.851	27.851
	Set pelayanan bayi baru lahir	Paket	33	33	33
	Set kegawat darurat neonatal	Paket	33	33	33
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	20.533	27.851	27.851
	Pencatatan dan pelaporan kohort bayi	Paket	33	27.851	27.851
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	33	34	34
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	715	715
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	1.124	1.124
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	115.257	28.089	115.257
	Kuisiонер Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	115.257	135.301	135.301
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	115.257	135.301	135.301
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	20.533	135.301	135.301
	Vitamin A Biru	Kapsul	21.112	135.301	135.301

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Vitamin A Merah	Kapsul	86.866	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: HB0	Vaksin	22.400	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	22.400	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	22.168	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20.260	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin	20.260	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela	Vaksin	21.458	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	Vaksin	20.449	135.301	135.301
	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	21.458	135.301	135.301
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	128.241	135.301	135.301
	Peralatan Anafilaktik	Paket	365	33	365
	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	Paket	33	33	33
	Pengadaan Set Imunisasi	Paket	33	33	33
	Pengadaaan SDIDTK KIT	Paket	33	33	33
	Pencatatan dan pelaporan kohort balita dan apras (anak pra sekolah)	Paket	33	135.301	135.301
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	33	167	167
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	715	715
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	1124	1124
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	33	52	52
	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	11.604	21.797	21.797
	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	Orang	33	66	66
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	241.807	42.833	241.807
	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	5.000	5.000	5.000
	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	5.000	5.000	5.000
	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	241.807	229.388	241.807
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	241.807	229.388	241.807
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	156	229.388	229.388
	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	33	167	167
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	715	715
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	1124	1124
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	33	52	52
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	33	46	46
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	15.520	1.356	15.520
	Tenaga non kesehatan : Guru (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang	1.552	21.797	21.797
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.065.565	320.099	1.065.565
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	33	104	104
	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	398	104	398
	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	398	104	398

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	398	104	398
	Alat : Tensimeter	Unit	33	104	104
	Alat : Glukometer	Unit	365	104	365
	Alat : Tes strip gula darah	Unit	772.502	28.372	772.502
	Alat : Lancet	Unit	772.502	7.093	772.502
	Alat : Kapas alcohol	Unit	772.502	14.186	772.502
	Alat : KIT IVA Tes	Unit	33	25	33
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	2	2.139	2
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	119	35	119
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971	175	971
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801	140	1.801
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	51	35	51
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	1.825	35	1.825
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	365	5.462	5.462
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	212.611	53.092	212.611
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	33	171.891	171.891
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	4.500	-	4.500
	Buku kesehatan lansia	Buku	5.000	5.000	5.000
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	119	167	119

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971	715	971
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801	1124	1.801
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	51	33	51
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	1.825	46	1.825
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	33	365	33
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	80.172	35.263	35.263
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	99	34	99
	Tensimeter	Unit	365	33	365
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	2	34	34
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	30	119	119
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	595	595
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	506	506
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	365	1.825	1.825
	Obat Hipertensi	Paket	3	389.650	389.650
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	28.471	11.477	28.471
	Alat : Glukometer	Unit	365	365	365
	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	8.000	772.502	772.502
	Alat : Kapas Alkohol	Unit	8.000	772.502	772.502
	Alat : Lancet	Unit	8.000	772.502	772.502

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	3	2	3
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	33	34	33
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	33	119	119
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	33	595	595
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	33	506	506
	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	25	51	51
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	33	1.825	1.825
	Obat Diabetes Melitus	Paket	2	634.500	634.500
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	3.149	1.169	3.149
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	2	33	33
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	0	34	34
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	66.000	3.300	66.000
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	3	34	34
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	33	119	119
	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	60	33	60
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	33	33	33

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	20.284	6.243	20.284
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	42	38	42
	Reagen Zn TB	Kit	42	231	231
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Box	42	9.205	9.205
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	42	11.665	11.665
	Catridge tes cepat molekuler	Test	9	16.367	16.367
	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	42	35	42
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	42	35	42
	Tenaga kesehatan : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	42	151	151
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	2.899	2.899
	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42	363	363
	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	9	3	9
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	42	4	42
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	42	35	42
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan	Orang			

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	37.230	9.793	37.230
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	42	45	42
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	37.230	33.166	37.230
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	37.230	33.166	37.230
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	37.230	33.166	37.230
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	42	1	42
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	42	1	42
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	1	42
	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	42	1	42
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	42	1	42
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	44	1	44
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	11.784	4.500	11.784
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.946	1.025	2.946
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2.946	97	2.946
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	3	3
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang dilayani	Orang	10.252	4.400	10.252
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2.563	1.100	2.563
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara	Rumah Tangga	0	100	0

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	2.563	1.000	2.563
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan & Rehabilitasi rumah yang layak huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.292	10	1.292
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	323	5	323
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		0	5	5
	Pemukiman kembali bagi korban bencana		0	-	-
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		0	-	-

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen	1	4	4
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	CAPAIAN LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani		0	300	300
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		0	-	0
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni		0	-	0
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen	0	1	1
BIDANG TRANTIBUMLINMAS					
	KATEGORI TANTRIBUM				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)				

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	74	74	74
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	195	195	195
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	6	9	9
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	23	122	122
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	2
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	2	2
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	2	2

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	KATEGORI DAMKAR				
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	304	120	304
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	108	30	108
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	2	2	2
	Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	462	565	565
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	9	61	61
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	60	20	60
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	244	20	244
	KEBENCANAAN				
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.340	65.732	65.732
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	6	10	10
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1.340	65.732	65.732
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	1.340	65.732	65.732
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	11	675	675
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.075	1.656	1.656
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	10.251	10.251	10.251
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang	Orang	1.075	1.656	1.656

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	90.531	115.364	115.364
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	3	3	3
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	90.531	115.364	115.364
	Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	209	168	209
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	1	1
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	113	168	168
BIDANG SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.555	535	1.555
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Layanan data dan pengaduan	Orang	43	25	43
	Penyediaan permakanan	Orang	316	80	316

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	43	25	43
	Penyediaan sandang	Orang	176	80	176
	Penyediaan alat bantu	Orang	38	15	38
	Penyediaan perbekalan Kesehatan	Orang	251	35	251
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	120	25	120
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	314	100	314
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	729	70	729
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	351	30	351
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	20	20
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	20	20
	Layanan rujukan	Orang	13	10	13
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	940	834	940
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Layanan data dan pengaduan	Orang	3	20	20
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	20	20
	Penyediaan permakanan	Orang	600	400	600
	Penyediaan sandang	Orang	289	288	289
	Penyediaan perbekalan Kesehatan	Orang	2	2	2

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	213	20	213
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	207	20	207
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	20	20
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	4	4
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	8	20	20
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	20	20
	Layanan rujukan	Orang	11	15	15
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2.212	1.648	2.212
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Layanan data dan pengaduan	Orang	7	4	7
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	7	4	7
	Penyediaan permakanan	Orang	1.821	1.100	1.821
	Penyediaan sandang	Orang	392	240	392
	Penyediaan alat bantu	Orang	1	10	10
	Penyediaan perbekalan Kesehatan	Orang	7	2	7
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	355	240	355
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	107	4	107

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	2	2
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	344	30	344
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	9	4	9
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	4	5
	Layanan rujukan	Orang	9	4	9
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	143	649	143
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Layanan data dan pengaduan	Orang	15	20	20
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	40	20	40
	Penyediaan permakanan	Orang	75	100	100
	Penyediaan sandang	Orang	62	100	100
	Penyediaan perbekalan Kesehatan	Orang	26	2	26
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	65	100	100
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	47	100	100
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas	Orang	2	2	2

No.	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	Satuan	Capaian Target 2024	Target Tahun 2025	
				Awal	Perubahan
	Anak / Bukti dokumen kependudukan				
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	59	5	59
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	43	100	100
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	43	50	50
	Layanan rujukan	Orang	35	50	50
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	55.000	50.342	55.000
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	Penyediaan permakanan	Orang	35.000	25.134	35.000
	Penyediaan sandang	Orang	500	45	500
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	500	15	500
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	150	10	150
	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	200	4	200
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen	1	1	1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengakibatkan perubahan terhadap rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa belanja seperti perjalanan dinas, makan minum, honorarium, dan alat tulis kantor sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025;
2. Adanya amanat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025, harus menyesuaikan dengan : (a) program Asta Cita; (b) beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Khusus yang berkaitan dengan penyesuaian dengan prioritas nasional dan visi/misi/program prioritas Bupati-Wakil Bupati dapat dirangkum sebagai berikut:

Prioritas Daerah/Nasional	Bentuk Kegiatan	PD Pelaksana
PPD 1: meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat (Bidang pendidikan dan Kesehatan, serta Bidang permukiman)		
Pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.	Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/ sederajat dan SMP/ sederajat	Dinas P dan K
	Penyusunan DED untuk fasilitas pendukung pendidikan olahraga (Stadion Pogar dan GOR Raci)	Dinas SDA-CK-TR
	Hibah KONI, Bupati Cup; Jalan Sehat	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Turnamen sepakbola antar kecamatan,	Kecamatan
Peningkatan akses infrastruktur sanitasi dasar (air minum, sanitasi, rumah layak huni).	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan KP
	Pembangunan MCK/ jamban/ SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah) Domestik Permukiman maupun Terpadu, IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)	Dinas SDA-CK-TR
	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase	Dinas SDA-CK-TR
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas SDA-CK-TR
Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Penanganan sampah lingkungan permukiman; pembangunan/ penyediaan sarana prasarana persampahan; Penanganan kawasan rawan sampah dan limbah kotoran ternak lekok; Penanganan TPA Wonokerto	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan permukiman
PPD 3: Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal		
Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan	Dukungan terhadap MBG	Kecamatan Bangil; Kecamatan Grati

Prioritas Daerah/Nasional	Bentuk Kegiatan	PD Pelaksana
kemandirian pangan berbasis Kawasan.		
Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penetapan dan Pengembangan sapi di Grati	Dinas Peternakan dan Keswan
	Penyusunan DED Pembibitan kentang; Pengadaan dan pengembangan teknologi pertanian (alsintan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan termasuk pariwisata	Peningkatan Infrastruktur Jalan dan jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi dan SDAir	Dinas SDA-CK-TR
Penanganan keamanan dan keselamatan lalu lintas pada jalan raya.	Peningkatan PJU dan pengadaan fasilitas untuk pemeliharaan PJU (Mobil Craine)	Dinas Perhubungan
Pemberdayaan masyarakat yang Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, religi, dan heritage secara kolaboratif dan partisipatif - Pengelolaan Amenitas Pendukung.	Pelaksanaan even antara lain festival dan lomba serta peringatan hari jadi kabupaten	Dinas Pariwisata
Penanganan Kerawanan Lingkungan dan Kebencanaan resiko tinggi serta Pengendaliannya sebagai dampak perubahan iklim.	Pembangunan shelter; Penanggulangan dan pencegahan banjir; Konservasi	BPBD; Dinas SDA-CK-TR; Dinas Lingkungan Hidup
PPD 2: Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat		
Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap	Penyelenggaraan even dan mengikuti even skala nasional, internasional dan lokal yang melibatkan semua unsur UMKM, koperasi dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Bagian Kerjasama;

Prioritas Daerah/Nasional	Bentuk Kegiatan	PD Pelaksana
ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis.	dikombinasikan dengan berbagai PD dan stakeholders (pasar dagang, pameran/ bazar/gebyar umkm-umkm award/ pasar murah), lomba-lomba, Kerjasama dalam rangka perdagangan/ perindustrian; Pendukung acara hari jadi	Bagian Protokol; Kecamatan; Dinas Pariwisata
Penguatan ekonomi desa melalui penguatan lembaga keuangan desa (koperasi, BUMDES, dan Lembaga keuangan lainnya).	Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Dinas Koperasi dan UMKM
Pemanfaatan potensi dan peluang untuk meningkatkan investasi.	Optimalisasi Mal Pelayanan Modal khususnya imigrasi; Penyusunan kajian dan naskah akademis penanaman modal dan insentif penanaman modal; Pengawasan perizinan khususnya tower	DPMPTSP
	Review RTRW	Dinas SDA-CK-TR
	Survey Kepatuhan Industri	Bappelitbangda
PPD 4: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdampak Berbasis Elektronik		
Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan berketahanan.	Penyusunan DED dan revitalisasi pada beberapa Fasilitas Perdagangan (Pasar Bangil, Pasuruan Creatif Center)	Disperindag; Dinas SDA-CK-TR
	Penyusunan studi kelayakan Jalan Lingkar	Dinas BMBK
Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pembangunan command center dan website kabupaten pasuruan; penyediaan fasilitas pendukung untuk optimalisasi pemantauan/ pengawasan dan percepatan pelayanan informasi digital kepada masyarakat (bencana/	Dinas Kominfo; Satpol PP; Dinas Perhubungan
Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE.		

Prioritas Daerah/Nasional	Bentuk Kegiatan	PD Pelaksana
	kerusakan/ lalu lintas/ keamanan dll) a.1. CCTV dan sistem pendukungnya	
Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Peningkatan aspek publikasi dan operasional layanan	Bagian Umum; Bagian Protokol; Bagian Tapem; Dinas Kominfo
	Revitalisasi bangunan rumah dinas untuk Kepala Daerah dan Kantor Kecamatan;	Dinas SDA-CK-TR; Kecamatan Rembang
	MTQ (Pergeseran giat ramadhan dll)	Bagian Kesra
	Pendampingan hukum pada ASN	Bagian Hukum
Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Pelaksanaan kegiatan pendukung keagamaan dan sosial budaya (hari santri, sholawat, ishari, baznas,	Bagian Kesra
	Kampung Pancasila; Hibah kepada lembaga keagamaan	Bakesbangpol

Selain tersebut di atas perubahan/pergeseran lainnya yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan dana desa dan BKK untuk desa untuk mendukung pelaksanaan asta cita dan program prioritas Bupati-Wakil Bupati.
2. Mempertimbangkan perkiraan BMKG kondisi cuaca ekstrem hidrometeorologi masih berpotensi terjadi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dalam beberapa bulan mendatang:
 - a) dana siaga bencana harus tetap tersedia, mengingat kejadian bencana sudah cukup sering terjadi beberapa bulan sebelumnya di tahun 2025 ini, dengan penambahan dana BTT (Belanja Tak Terduga)
 - b) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kejadian pasca bencana di tahun 2025, khususnya banjir yaitu :
 - pembangunan jembatan Karangjatiyanyar di Kecamatan Wonorejo.

- penanganan normalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.
3. Pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin.

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Buku 2 Tabel 5.2 Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU APBD TAHUN 2025	PAGU P-RKPD TAHUN 2025
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.164.629.179.892,00	1.314.303.340.840,00	1.298.405.231.980,00
2	DINAS KESEHATAN	631.540.967.108,00	607.386.048.902,00	585.077.699.194,00
3	RSUD BANGIL	287.393.500.077,00	383.443.091.077,00	400.440.632.717,00
4	RSUD GRATI	61.312.903.563,00	102.207.738.563,00	125.027.738.563,00
5	DINAS SUMBER DAYA AIR, CK, DAN TR	76.094.634.490,00	77.096.683.242,00	62.277.249.547,00
6	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	80.369.353.165,00	106.026.206.349,00	156.917.149.608,00
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.612.991.658,00	12.375.683.298,00	2.386.379.132,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.107.296.814,00	24.224.894.985,00	24.271.916.190,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU APBD TAHUN 2025	PAGU P-RKPD TAHUN 2025
9	BPBD	5.502.127.350,00	7.569.988.413,00	9.372.739.858,00
10	DINAS SOSIAL	31.658.984.712,00	34.133.376.249,00	35.150.554.869,00
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	15.195.141.338,00	26.603.162.538,00	12.651.165.104,00
12	DINAS PP-PA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	22.735.785.865,00	24.246.313.383,00	22.439.069.331,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	33.666.146.432,00	36.992.863.631,00	33.273.117.844,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.998.995.502,00	24.670.390.175,00	25.357.531.185,00
15	DINAS ADMINDUK PENCATATAN SIPIL	9.139.130.207,00	12.751.010.232,00	11.580.935.973,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.347.341.912,00	18.036.176.187,00	17.312.927.715,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	47.420.802.985,00	58.925.293.911,00	93.380.942.215,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.652.830.699,00	25.604.983.823,00	33.412.089.764,00
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.237.289.590,00	7.726.249.394,00	8.535.211.694,00
20	DINAS PM DAN PT SATU PINTU	6.630.804.681,00	7.068.060.282,00	7.261.820.200,00
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14.112.476.915,00	28.848.784.286,00	32.082.050.552,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	8.916.708.169,00	10.335.566.169,00	8.013.113.744,00
23	DINAS PERIKANAN	8.852.091.618,00	10.785.119.134,00	8.569.407.322,00
24	DINAS PARIWISATA	17.814.205.601,00	26.744.967.941,00	21.773.308.836,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU APBD TAHUN 2025	PAGU P-RKPD TAHUN 2025
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23.405.787.722,00	26.320.410.200,00	23.371.530.796,00
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99.874.034.437,00	26.010.205.998,00	26.491.611.739,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	38.398.232.413,00	55.783.331.578,00	59.603.379.550,00
28	SEKRETARIAT DPRD	41.447.205.600,00	117.719.779.338,00	91.838.904.453,00
29	BAPPELITBANGDA	13.667.669.067,00	15.143.751.217,00	13.813.639.059,00
30	BPKPD	1.121.411.325.806,00	927.686.538.216,00	870.633.808.227,37
31	BKPSDM	12.583.396.896,00	12.998.656.328,00	11.731.642.252,00
32	INSPEKTORAT	15.629.318.464,00	25.331.857.210,00	19.872.840.072,00
33	KECAMATAN GEMPOL	2.150.459.222,00	2.634.334.897,00	2.453.003.228,00
34	KECAMATAN BANGIL	10.086.921.855,00	20.062.038.691,00	19.434.717.036,00
35	KECAMATAN REMBANG	1.931.554.095,00	2.244.068.229,00	2.399.825.262,00
36	KECAMATAN PRIGEN	4.043.346.202,00	6.897.644.540,00	6.627.128.579,00
37	KECAMATAN POHJENTREK	2.601.864.190,00	3.021.184.445,00	3.031.245.945,00
38	KECAMATAN GONDANGWETAN	3.817.682.240,00	4.670.591.559,00	4.406.544.206,00
39	KECAMATAN WINONGAN	2.175.994.272,00	2.479.299.277,00	2.472.870.675,00
40	KECAMATAN REJOSO	2.519.607.191,00	2.846.994.109,00	2.872.468.627,00
41	KECAMATAN GRATI	3.627.293.165,00	4.934.240.619,00	4.789.393.129,00
42	KECAMATAN LEKOK	1.860.627.422,00	2.175.140.728,00	2.085.519.076,00
43	KECAMATAN NGULING	2.844.170.187,00	3.303.519.453,00	3.308.385.370,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU APBD TAHUN 2025	PAGU P-RKPD TAHUN 2025
44	KECAMATAN SUKOREJO	2.316.115.413,00	2.723.974.824,00	2.652.969.655,00
45	KECAMATAN PASREPAN	2.103.670.178,00	2.589.272.304,00	2.507.589.941,00
46	KECAMATAN PANDAAN	5.125.920.615,00	9.190.008.636,00	9.052.674.414,00
47	KECAMATAN TOSARI	2.204.666.312,00	2.731.228.520,00	2.552.139.727,00
48	KECAMATAN PURWOSARI	4.480.744.824,00	5.131.087.957,00	4.989.285.371,00
49	KECAMATAN PURWODADI	2.782.401.400,00	3.476.588.410,00	3.288.392.741,00
50	KECAMATAN LUMBANG	2.623.851.022,00	2.926.872.493,00	2.758.255.149,00
51	KECAMATAN KRATON	3.369.764.198,00	3.675.517.657,00	3.594.358.074,00
52	KECAMATAN TUTUR	2.067.971.973,00	2.488.206.218,00	2.377.686.570,00
53	KECAMATAN BEJI	3.287.345.239,00	5.553.854.923,00	5.262.853.965,00
54	KECAMATAN PUSPO	2.078.840.074,00	2.487.301.003,00	2.397.477.959,00
55	KECAMATAN KEJAYAN	3.532.581.512,00	4.845.927.923,00	4.573.046.935,00
56	KECAMATAN WONOREJO	2.568.949.968,00	3.184.706.928,00	3.037.619.269,00
57	BAKESBANGPOL	11.123.135.252,00	44.688.539.549,00	40.292.780.807,00
JUMLAH		4.081.684.138.769,00	4.346.062.666.981,00	4.305.545.570.995,37

BAB VI

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan bagian penting dari rangkaian Perencanaan Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, *stakeholder*, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Pasuruan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

6.1. Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) serta visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati.
2. Perubahan asumsi/target indikator makro tahun 2025 pada indikator pertumbuhan ekonomi yaitu dari 6,14% menjadi 5,38%, menyesuaikan target Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan indikator lain ditetapkan : Kemiskinan 8,35%, Inflasi 1,5-3,5%; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,70%; Indeks Pembangunan Manusia 72,85; dan Rasio Gini 0,329.
3. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati antara lain diarahkan pada penyelesaian isu strategis terkait dengan pengendalian/penanganan bencana banjir, infrastruktur jalan dan perlengkapan jalan, serta penanganan kawasan kumuh.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang harus diperhatikan:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
3. Perangkat Daerah menindaklanjuti dan memedomani Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Perubahan yang dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas antara perubahan target indikator program/kegiatan/subkegiatan dengan perubahan pagu anggaran.

6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian P-RKPD tahun 2025 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang telah dianggarkan dan ditetapkan dalam P-APBD Tahun 2025.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang perencanaan.
3. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan dasar penentuan target kinerja tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

